

JAP | Jurnal Akuntansi Publik  
 Web | <https://jap.fdas.org>  
 Issue | Vol 1 No 1 hal 127-144

**Histori artikel:**  
 Diterima: 13-08-2018  
 Direvisi: 21-08-2018  
 Disetujui: 25-08-2018

**Fitriatun Nisa, Wahyudin  
 Nor**

Universitas Lambung  
 Mangkurat, Jl. Brigjen H.  
 Hasan Basri No.3, RW.02,  
 Pangeran, Banjarmasin  
 Utara., Kota Banjarmasin,  
 Kalimantan Selatan 70124,  
 Indonesia

**Penerbit:** Forum Dosen  
 Akuntansi Sektor Publik

## Penelitian Kuantitatif

Fitriatun Nisa, Wahyudin Nor

### **Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kemakmuran, Dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia**

**ABSTRAK:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh *intergovernmental revenue* pada kinerja keuangan di pemerintahan daerah; (2) pengaruh kemakmuran pada kinerja keuangan pemerintah daerah; (3) pengaruh ukuran pemerintah pada kinerja keuangan pemerintahan daerah. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi menggunakan data sekunder yaitu laporan penganggaran dari pendapatan dan pengeluaran untuk tahun 2015-2016. Teknik pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS Versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *intergovernmental revenue* dan ukuran pemerintah mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan variabel kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kinerja keuangan, APBD, *Intergovernmental Revenue*, kemakmuran, ukuran pemerintah.

**ABSTRACT:** The purpose of this research is to know (1) the effect of *intergovernmental revenue* on financial performance of local government; (2) the effect of prosperity on financial performance of local government; (3) the effect of government size on financial performance of local government. Population of this research is all of the Province of Indonesia which amount 34 provinces using secondary data which is budget report of Revenue and Expenditure for years 2015-2016. Research data collection technique done through documentation technique. Data used in this research is quantitative. The technique of data analysis used multiple linear regression analysis with support with IBM SPSS Version 21 program. The results showed that *intergovernmental revenue* and government size variables affect the financial performance of local government in Indonesia, while prosperity variabel has no effect on the financial performance of local government in Indonesia.

**Keywords:** Financial Performance, APBD, *Intergovernmental Revenue*, Prosperity, Government Size.



This is an open access article under the CC-BY-SA license

**Corresponding Author: Fitriatun Nisa**

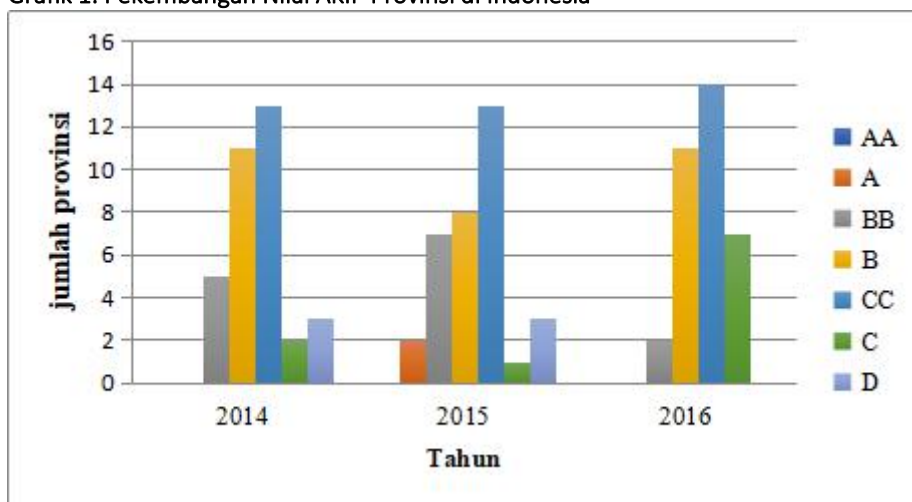
✉ [fitriatun.nisa45@gmail.com](mailto:fitriatun.nisa45@gmail.com)

©fdasp 2018. All right reserved

## PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah, kinerja keuangan pemerintah dinilai masih banyak yang bermasalah (Hariyadi, 2002;Azhar, 2008). Kinerja rata-rata pemkab/pemkot pada tahun 2016 masih di kategorikan C (agak kurang) yakni dengan skor sekitar 30-50 (Jajeli, 2017). Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten dan Kota pada 2016 mengalami kenaikan 2,95 poin yakni dibanding tahun sebelumnya dari 46,92 menjadi 49,87. Meski nilai evaluasinya mengalami kenaikan, 83% Kabupaten dan Kota (425 Daerah) masih dikategorikan nilai C.

Grafik 1. Perkembangan Nilai AKIP Provinsi di Indonesia



Sumber : Data sekunder diolah peneliti (2018)

Dari data di atas pada tahun 2014 yang mendapatkan nilai BB ada 5 Provinsi, nilai B 11 Provinsi, nilai CC 13 Provinsi, nilai C 2 Provinsi, dan nilai D 3 Provinsi. Kemudian pada tahun 2015 ada 2 Provinsi yang mendapatkan nilai A yaitu; Jawa Timur dan D.I Yogyakarta, nilai BB 7 Provinsi, nilai B 8 Provinsi, nilai CC 13 Provinsi, nilai C 1 Provinsi, dan nilai D 3 Provinsi. Tahun 2016 tidak ada Provinsi yang mendapatkan nilai A, untuk nilai BB ada 2 Provinsi, nilai B 11 Provinsi, nilai CC 14 Provinsi, nilai C 7 Provinsi ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)).

Disisi lain berhubungan dengan AKIP adalah rapor Kinerja Pemerintah. Nilai tertinggi dari evaluasi AKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85-100. Nilai A (sangat baik) skornya 75-85, CC (cukup baik) dengan skor 50-65, C (agak kurang) dengan skor 30 - 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0-30. Rendahnya tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah disebabkan empat masalah utama. Yakni sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, lalu ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan perincian kegiatan

tidak sesuai dengan tujuan kegiatan. Empat masalah itu membuat penggunaan anggaran di instansi Pemerintah tak efisien.

Kinerja keuangan yang tidak optimal juga disebabkan permasalahan hukum yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kinerja keuangan daerah menjadi perhatian masyarakat. Berbagai peraturan keuangan yang diterbitkan tidak diiringi dengan peningkatan hasil kinerja keuangan. Hal ini terbukti masih banyaknya persoalan yang dihadapi pemerintah daerah mulai dari penyimpangan sampai pengungkapan yang tidak jelas dalam pengelolaan keuangan (Sari, 2016).

Di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah hanyalah sebatas menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Pratama, 2015).

Kinerja keuangan pemerintah daerah Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karakteristik daerah (Sumarjo, 2010). Adapun Proksi dari karakteristik pemerintah tersebut diantaranya meliputi intergovernmental revenue, tingkat kemakmuran dan ukuran pemerintah daerah. Intergovernmental revenue sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Transfer tersebut di Indonesia dikenal sebagai dana perimbangan. Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia mengakibatkan kewenangan yang begitu luas diserahkan ke daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal. Dana tersebut dalam peraturan perundang-undangan dinamakan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan tersebut bersama dengan PAD merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan ditingkat daerah. Ketergantungan dimiliki pemerintah daerah di Indonesia terhadap dana perimbangan yang ditransfer dinilai masih sangat tinggi (Sunardi, 2016).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka pendek dan jangka panjang sangatlah penting. Melalui pengukuran nilai pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis prestasi maupun perkembangan perekonomian suatu negara dari suatu periode untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kemakmuran. Kondisi suatu negara dikatakan makmur apabila tidak ada atau jarang nya permasalahan yang muncul baik sektor perekonomian, kondisi sosial-politiknya, pendidikan dan kesehatan. Kemakmuran suatu negara ditentukan besarnya nilai tambah yang tercipta berupa pendapatan yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Manik, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang berasal dari setiap wilayah. Apabila jumlah pendapatan asli daerah meningkat, maka kebutuhan daerah tersebut akan terpenuhi untuk kemakmuran masyarakat juga meningkat.

Kemakmuran masyarakat bisa dilihat dari jumlah penduduk. Namun pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, tetapi termasuk kepentingan kesejahteraan penduduk dan pembangunan. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan jumlah penduduk sehingga kebutuhan anggaran jumlah penduduk yang sedikit akan berbeda dengan wilayah yang jumlah penduduknya besar (Manik, 2013). Penelitian ini memfokuskan untuk menguji dan menjelaskan **“Pengaruh Intergovernmental Revenue, Kemakmuran, Dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.”** Sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah Data Laporan APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2013) mengatakan bahwa Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja pemerintahan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Menurut Halim (2007:231) terdapat empat rasio yang dapat dijadikan tolok ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2007

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Kriteria kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Persentase Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 – 25
Rendah	> 25 – 50
Sedang	> 50 – 75
Tinggi	> 75 – 100

Sumber: Halim, 2007

Rasio Efektivitas dan Efisiensi

*Rasio Efektivitas*

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yg Ditetapkan Berdasar Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2007

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemda. Kriteria efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

*Rasio Efisiensi*

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja semakin baik. Untuk itu, pemda perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemda berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2007

**Tabel 3. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Tidak Efisien	>100
Kurang Efisien	>90 – 100
Cukup Efisien	>80 – 90
Efisien	>60 – 80
Sangat Efisien	≤60

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

#### Rasio Aktivitas

##### *Rasio Keserasian*

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2007

Belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi

kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemda untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

#### *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan PAD, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Halim 2007: 238). DSCR merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan Bagian Daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan Angsuran Pokok, Bunga dan Pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}} \times 100\%$$

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

Sumber: Halim, 2007

#### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim 2007:241).

#### **Intergovernmental Revenue**

Patrick (2007) mengartikan intergovernmental revenue sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya. Transfer tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan.

#### **Kemakmuran**

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Abdullah (dalam Sumarjo 2010) menyatakan bahwa kemakmuran dari pemerintah daerah dapat dilihat

dari PAD. PAD merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Membiayai kebutuhan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan PAD agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

### Ukuran Pemerintah

Pemerintah daerah yang didasarkan pada total pendapatan dengan jumlah penduduk dimana pemerintah daerah dengan total pendapatan yang lebih besar dapat memberikan kemudahan dalam memberi pelayanan masyarakat guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Sari, 2016). Indonesia pada urutan ke-4 dunia jumlah penduduk terbesar sekitar 241.452.952 jiwa berdasarkan jumlah penduduk sehingga kebutuhan anggaran untuk jumlah penduduk yang sedikit akan berbeda dengan wilayah yang jumlah penduduk besar (Manik, 2013).

### Perumusan Hipotesis

Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan dari pemberian dana perimbangan sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerjanya. Namun, ketergantungan yang dimiliki pemerintah daerah di Indonesia terhadap dana perimbangan yang ditransfer dinilai masih sangat tinggi, dapat menjadi salah satu permasalahan terkait otonomi dan desentralisasi keuangan daerah (Rahman, 2014). Hal itu juga dapat dibuktikan oleh penelitian Masdiantini (2016) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Novyandra menemukan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

*H1: Intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.*

Pemerintah daerah tidak akan sepenuhnya bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentu akan menunjang sebuah daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja keuangannya secara mandiri. Penelitian mengenai pengaruh PAD sebagai proksi dari kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperkuat dengan hasil penelitian Wenny (2012) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Masdiantini (2016) menemukan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

*H2: Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.*

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan jumlah penduduk sehingga kebutuhan anggaran untuk jumlah penduduk yang sedikit akan berbeda dengan wilayah yang jumlah penduduk besar sesuai dengan penelitian yang dilakukan Manik (2013) menyatakan ukuran pemerintah daerah secara tidak langsung berpengaruh signifikan dan hasil penelitian Pratama (2015) menyatakan bahwa pula ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan jumlah penduduk



sehingga kebutuhan anggaran untuk jumlah penduduk yang sedikit akan berbeda dengan wilayah yang jumlah penduduk besar sesuai dengan penelitian yang dilakukan Manik (2013) menyatakan ukuran pemerintah daerah secara tidak langsung berpengaruh signifikan dan hasil penelitian Pratama (2015) menyatakan bahwa pula ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

*H3: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia*

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi di Indonesia (34 provinsi) tahun 2015-2016. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Indonesia dan data jumlah penduduk yang mencantumkan seluruh data jumlah penduduk pada website Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2015-2016.. Teknik pemilihan sampel untuk penelitian ini menggunakan metode sensus atau *sampling jenuh*. Jumlah periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 tahun, sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Di bawah ini merupakan ringkasan variabel dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4. Ringkasan Variabel dan Definisi Oprasional

Jenis Variabel	Variabel	Pengukuran
Dependen (Y)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Total Penerimaan}} \times 100\%$
	Intergovernmental Revenue (X1)	$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$
Independen (X)	Kemakmuran (X2)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Ukuran Pemerintah (X3)	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta terdiri dari ribuan pulau kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas wilayah Indonesia adalah 1.930.931.32

Km<sup>2</sup>. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Adapun daftar provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Daftar Provinsi di Indonesia berserta Ibu Kotanya**

No	Provinsi	Ibu Kota
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh
2	Sumatera Utara	Medan
3	Sumatera Barat	Padang
4	Sumatera Selatan	Palembang
5	Bengkulu	Bengkulu
6	Riau	Pekanbaru
7	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang
8	Jambi	Jambi
9	Lampung	Bandar Lampung
10	Bangka Belitung	Pangkal Pinang
11	Jawa Barat	Bandung
12	Jawa Tengah	Semarang
13	Jawa Timur	Surabaya
14	DKI Jakarta	Jakarta
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta
16	Banten	Serang
17	Bali	Denpasar
18	Nusa Tenggara Timur	Kupang
19	Nusa Tenggara Barat	Mataram
20	Kalimantan Barat	Pontianak
21	Kalimantan Timur	Samarinda
22	Kalimantan Tengah	Palangkaraya
23	Kalimantan Selatan	Banjarmasin
24	Kalimantan Utara	Tanjung Selor
25	Gorontalo	Gorontalo
26	Sulawesi Barat	Mamuju
27	Sulawesi Tengah	Palu
28	Sulawesi Utara	Manado
29	Sulawesi Tenggara	Kendari
30	Sulawesi Selatan	Makassar
31	Maluku	Ambon
32	Maluku Utara	Ternate
33	Papua	Jayapura
34	Papua Barat	Manokwari

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8,83292453
Most Extreme Differences	Absolute	,150
	Positive	,150
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		1,235
Asymp. Sig. (2-tailed)		,094

Sumber : Data sekunder diolah peneliti (2018)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal, karena nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0,094 (lebih besar dari 0,05).

#### Uji Multikolonieritas

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolonieritas**

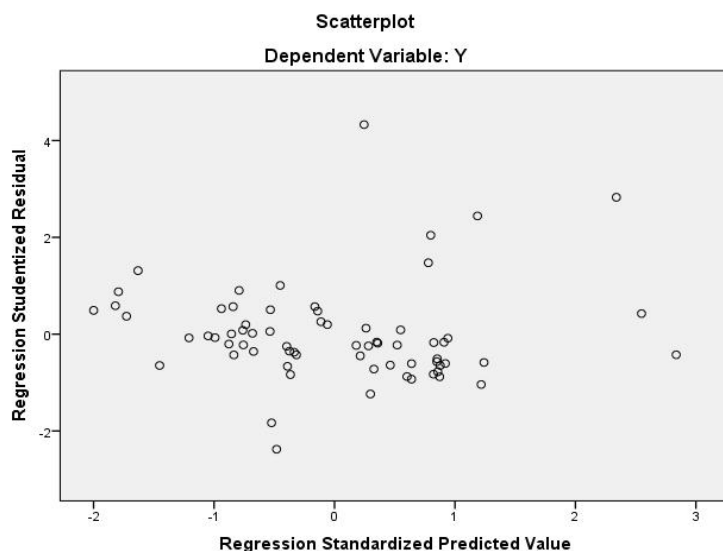
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	96,149	3,680		26,131	,000		
X1	14,649	7,079	,279	2,069	,043	,730	1,370
X2	-7,056E-14	,000	-,051	-,369	,714	,687	1,455
X3	1,816E-6	,000	,254	2,117	,038	,921	1,086

Sumber : Data sekunder diolah peneliti (2018)

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi mutikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

#### Uji Heteroskedastisitas

### Grafik 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data sekunder diolah peneliti (2018)

Dari Grafik 2. di atas, grafik scatterplot dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak di atas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y sehingga dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,391 <sup>a</sup>	,153	,113	9,03758	1,677

Tabel 8. Hasil

**Uji Autokorelasi**

Nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,677 dan nilai tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ , jumlah pengamatan sebanyak 68 ( $n = 68$ ), dan jumlah variabel independen 3 ( $k = 3$ ). Maka berdasarkan tabel statistik DW didapat nilai batas bawah (dL) sebesar 1,5164 dan nilai batas atas (dU) 1,7001. Nilai DW 1,677 lebih dari dL 1,5164 dan kurang dari dU 1,0291. JikadL  $\leq d \leq$  dU, maka tidak dapat disimpulkan adanya korelasi atau tidak.

Jika tidak dapat disimpulkan, maka autokorelasi dapat di uji dengan Run Test yang merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Uji Runs dilakukan dengan membuat hipotesis apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H0 ditolak yang berarti data residual tidak random atau terjadi autokorelasi dan jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H0

diterima yang berarti data residual random atau tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2011).

Berikut ini hasil uji *Run Test* dari data yang telah diolah:

**Tabel 9. Hasil Uji *Run Test***

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-1,59852
Cases < Test Value	34
Cases >= Test Value	34
Total Cases	68
Number of Runs	29
Z	-1,466
Asymp. Sig. (2-tailed)	,143

Sumber : Data sekunder diolah peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,143 dan nilainya lebih dari 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  yang menyatakan bahwa data residual random atau tidak terjadi autokorelasi diterima, dan  $H_0$  yang menyatakan terjadi autokorelasi ditolak.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 10. Hasil Uji Statistik T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	96,149	3,680		26,131	,000
X1	14,649	7,079	,279	2,069	,043
X2	-1,706E-013	,000	-,051	-,369	,714
X3	1,816E-006	,000	,254	2,117	,038

Sumber : Data sekunder diolah peneliti (2018)

### Hasil Uji Hipotesis 1

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 5.7 koefisien regresi variabel *intergovernmental revenue* adalah 14,649 dan tingkat signifikansi sebesar 0,043, lebih kecil dari 5% atau 0,05. Artinya, *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan *intergovernmental revenue* mendorong keinginan pemda untuk melakukan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sumarjo (2010) dan (Sari,

2016) yang menemukan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Masdiantini (2016) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Indonesia.

Teori principal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal yakni terjadi pendelegasian wewenang. Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (principal) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal (Lupia dan McCubbins, 2000).

Menurut Patrick (2007) semakin tinggi *intergovernmental revenue* semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* merupakan transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Besar *intergovernmental revenue* menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Terlaksananya pemerintahan dapat berimplikasi yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah pusat berharap dengan adanya dana transfer dana tersebut maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik.

#### Hasil Uji Hipotesis 2

Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) dalam penelitian ini adalah kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 5.7 koefisien regresi variabel kemakmuran adalah -1,706E-013 dan tingkat signifikansi sebesar 0,714, lebih besar dari 5% atau 0,05. Artinya, kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kemakmuran suatu pemerintah tidak mencerminkan keinginan pemda untuk melakukan peningkatan kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Wenny (2012) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masdiantini (2016) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat diterima mengingat masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah akan dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini variabel kemakmuran diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PAD. Laju pertumbuhan PAD mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan maupun meningkatkan keberhasilan dalam memungut PAD dari periode ke periode. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus melakukan upaya yang lebih optimal ke depannya dalam menggali sumber-sumber PAD yang ada di daerahnya. Diketuinya pertumbuhan untuk sumber pendapatan, maka dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu kemakmuran akan dapat terwujud apabila PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja pelayanan publik daripada belanja aparatur daerah.

Berdasarkan data, salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 523.097.833.373, dimana seharusnya ketika peningkatan PAD maka kinerja keuangan juga akan meningkat, sebaliknya terjadi penurunan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -7,31. Peningkatan PAD juga terjadi di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar Rp 253.373.646.119 namun kinerja keuangannya mengalami penurunan sebesar -4,02.

Fenomena lainnya yaitu ketika PAD menurun tetapi kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat terjadi di beberapa provinsi di Indonesia selama tahun 2015-2016. Sumatera Utara dan Kalimantan Utara merupakan provinsi yang mengalami penurunan PAD sebesar Rp -253.412.471.678 dan Rp -50.000.160.776, tetapi kinerja keuangan mengalami peningkatan sebesar 5,92 dan 6,81. Selain itu, Bangka Belitung juga mengalami penurunan dalam PAD sebesar Rp -4.167.540.514, sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya mengalami kenaikan 21,93. Hal inilah yang diduga mengakibatkan PAD yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dimana kenaikan PAD tidak diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga penurunan PAD yang tidak seharusnya diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia selama tahun 2015-2016 yang telah disebutkan sebelumnya.

Tidak ada nya pengaruh kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat diduga karena masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah akan dana dari pemerintah pusat dalam penelitian ini variabel kemakmuran diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PAD. Laju pertumbuhan PAD mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan maupun meningkatkan keberhasilan dalam memungut PAD dari periode ke periode. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus melakukan upaya yang lebih optimal ke depannya dalam menggali sumber-sumber PAD yang ada di daerahnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk sumber pendapatan, maka dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu kemakmuran akan dapat terwujud apabila PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja pelayanan publik daripada belanja aparatur daerah (Masdiantini, 2016).

### Hasil Uji Hipotesis 3

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 5.7 koefisien regresi variabel ukuran pemerintah adalah 1,816E-006 dan tingkat signifikansi sebesar 0,038, lebih kecil dari 5% atau 0,05. Artinya, ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pratama (2015) yang menyatakan bahwa bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling

bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta member wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Hal ini berarti bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah, yang artinya ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang didasarkan pada total pendapatan sehingga anggaran pendapatan untuk jumlah penduduk yang sedikit akan berbeda dengan wilayah yang jumlah penduduk besar, dimana semakin banyak pendapatan yang diperoleh menggambarkan bahwa semakin produktif kinerja pemerintah daerah. Ukuran pemerintah yang dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan pelaksanaan kegiatan maupun program-program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Variabel *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Intergovernmental Revenue* (dana perimbangan) berperan penting dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan besarnya *intergovernmental revenue* menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dapat digunakan pemerintah. Variabel Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini mengingat masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah akan dana dari pemerintah pusat. Variabel Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil Penelitian ini memberikan bukti empiris untuk menambah literature penelitian-penelitian di Indonesia dan menambah pengetahuan secara khusus tentang pengaruh *intergovernmental revenue* dan ukuran pemerintah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan dalam ilmu akuntansi di bidang akuntansi sektor publik. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan cara mengelola penerimaan khususnya dana perimbangan yang jumlahnya cukup besar pada kegiatan/program yang mengarah ke peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terkait dengan pengumpulan data berupa jumlah penduduk tidak sepenuhnya dapat diperoleh di situs resmi Badan Pusat Statistik sehingga harus mencari situs setiap provinsi di Indonesia. Sehingga dengan keterbatasan ini peneliti memberikan saran yaitu akses informasi diharapkan



pemerintah provinsi menyediakan data keuangan dan data jumlah penduduk dapat diperoleh pada satu situs sepenuhnya sehingga informasi data yang didapat lebih *update* dan lebih akurat, Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya agar lebih baik sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal dan pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang ada di daerahnya dan diharapkan PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja pelayanan publik daripada belanja aparatur daerah, dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah dengan menggunakan variabel karakteristik daerah yang lain lagi seperti belanja daerah, kekayaan daerah, dan *leverage*.

## REFERENSI

- Depdagri.1997. Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1), 53-64.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, I. A. (2012). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jajeli, R. (2017, Januari 31). *Nilai Rata-Rata Kinerja Pemda Se-Indonesia Tahun 2016 Masih 'C'*. Retrieved From Detiknews: <https://News.Detik.Com/Berita/3409973/Nilai-Rata-Rata-Kinerja-Pemda-Se-Indonesia-Tahun-2016-Masih-C>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm:Managerial Behaviior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Kusumawardani, Meidia. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*, 1 (1):27:35
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1 Ed.). Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta.
- Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan

- Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 9, 108.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan*. Bali.
- Patrick. (2007). The Determinant Of Organizational Inovativeness: The Adoption Of Gasb 34 In Pennsylvania Local Government. *The Pennsylvania State University*.
- Pratama, K. A., Werastuti, D. N., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Bali Tahun 2010-2013). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 3, 1-12.
- Rahman, M. R. (2014, Juni 13). *Ketergantungan Pemda Atas Dana Perimbangan Sangat Tinggi*. Retrieved From Antara Jatim: [Http://Www.Antarajatim.Com/Lihat/Berita/134898/Ketergantungan-Pemda-Atas-Dana-Perimbangan-Sangat-Tinggi](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/134898/ketergantungan-pemda-atas-dana-perimbangan-sangat-tinggi)
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Fekon*, 3, 679.
- Sosetyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)*. Surakarta.
- Sunardi. (2016). Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Pengawasan Intern, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7 (02), 8-15.
- Wenny. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan